



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan
Telepon : 021-5224658, Faksimile : 021-5225044
Laman : www.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi@kemenkumham.go.id

Nomor : IMI.1-OT.01.01-008 28 Januari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Panduan Data Dukung Penilaian
Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja
Divisi Kemigrasian Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di Seluruh Indonesia

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian dan mempermudah pemenuhan data dukung Rencana Aksi Divisi Keimigrasian Tahun 2024, bersama ini disampaikan Pedoman Data Dukung Rencana Aksi Divisi Keimigrasian yang harus dilengkapi pada setiap periode penilaian Rencana Aksi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masa Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Divisi Keimigrasian adalah sebagai berikut:
 - 1) Triwulan I (B03) mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2024;
 - 2) Triwulan II (B06) mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2024;
 - 3) Triwulan III (B09) mulai tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2024;
 - 4) Triwulan IV (B12) mulai tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025.
 - b. Pelaporan Rencana Aksi disesuaikan dengan implementasi dan hasil yang diperlukan sebagaimana terlampir.
3. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi penanggung jawab/*Person In Charge* wilayah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto
NIP 197311161993031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

LAMAPIRAN I

Surat Sekretaris Direktorat Jendral Imigrasi

Nomor : IMI.1-OT.01.01-008

Tanggal : 28 Januari 2024

PENJELASAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI
DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2024

ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENJELASAN
1. Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari – Maret (B03)	1. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	1. Laporan sosialisasi	Data dukung: 1. Laporan sosialisasi pelayanan e-paspor oleh seluruh Kantor Imigrasi dan data implementasi e-paspor pada 102 kantor imigrasi yang telah melaksanakan; 2. Laporan internalisasi perluasan pelayanan e-paspor pada 24 Kantor Imigrasi tambahan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi; 3. Divisi Keimigrasian membuat kompilasi laporan pelaksanaan sosialisasi dan implementasi pelayanan e-paspor. Penjelasan: Pelaksanaan perluasan pelayanan e-paspor pada 126 Kantor Imigrasi telah termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik Dengan Lembar Laminasi Tahun 2024 tanggal 08 Januari 2024 (link surat)

	April – Juni (B06)	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian 2. Laporan monev pemantauan perluasan pelayanan e-paspor oleh Divisi Keimigrasian <p>Penjelasan: Dalam hal terdapat Kantor Imigrasi yang belum melaksanakan pelayanan e-paspor dapat melampirkan laporan identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas perluasan pelayanan e-paspor</p>
	Juli – September (B09)	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian 2. Laporan monev pemantauan perluasan pelayanan e-paspor oleh Divisi Keimigrasian
	Oktober – Desember (B12)	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<p>Data dukung:</p> <p>Laporan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pada pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian</p>
2. Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan	Januari-Maret (B03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta analisa kebutuhan pelayanan paspor di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan 	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung berupa analisis kebutuhan layanan paspor pada masing -masing Kantor Imigrasi 2. Data dukung berupa penambahan/penyesuaian kuota merujuk pada hasil pemetaan pada Kantor Imigrasi

<p>kapasitas produksi</p>				<p>3. Data dukung berupa laporan peningkatan layanan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebutuhan pelayanan paspor disesuaikan dengan formulasi dalam Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2.UM.01.01-4.0700 tanggal 18 Februari 2022 (link surat) 2. Penyesuaian kuota paspor elektronik dan nonelektronik pada aplikasi m-paspor akan disampaikan melalui Surat Direktorat Jenderal Imigrasi pada periode B03 3. Data dukung dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian
	<p>April-Juni (B06)</p>	<p>Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Data dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan implementasi peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi 2. Laporan Monev oleh Divisi Keimigrasian bahwa setiap satuan kerja telah melaksanakan peningkatan penerbitan paspor elektronik 3. Laporan Kompilasi oleh Divisi Keimigrasian

	Juli-September (B09)	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Data dukung: 1. Laporan implementasi peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi 2. Laporan Monev oleh Divisi Keimigrasian bahwa setiap satuan kerja telah melaksanakan peningkatan penerbitan paspor elektronik 3. Laporan Kompilasi oleh Divisi Keimigrasian
	Oktober – Desember (B12)	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Data dukung: Laporan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pelaksanaan peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi dan Laporan Kompilasi oleh Divisi Keimigrasian
3. Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas Negara	Januari-Maret (B03)	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (<i>awareness</i>) melalui pengayaan (<i>enrichment</i>) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	1. Pembentukan Tim pelaksana (Kanim) 2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait (hasil pemetaan daerah – daerah rawan TPPO dan TPPM untuk dijadikan dasar pembentukan desa binaan)	Data Dukung: 1. SK Tim Pelaksana Pembentukan Desa Binaan Imigrasi (<i>format terlampir</i>) 2. SK Penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi 3. Laporan koordinasi dengan instansi terkait perihal pencegahan TPPO dan TPPM lintas negara dan perihal pemetaan daerah – daerah rawan TPPO, TPPM dan hal-hal lain yang terkait dengan Keimigrasian untuk dijadikan dasar pembentukan desa

			<p>3. Laporan Kompilasi (SK Tim dan Koordinasi) oleh Divisi Keimigrasian</p> <p>4. Kompilasi SK dan Laporan Koordinasi oleh Divisi Keimigrasian.</p> <p>Penjelasan: Untuk SK Penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi akan dijelaskan dalam Surat Direktorat Jenderal Imigrasi</p>
	April – Juni (B06)	<p>1. Laporan pelaksanaan kegiatan desa binaan</p> <p>2. Laporan Kompilasi pelaksanaan kegiatan desa binaan</p>	<p>Data Dukung:</p> <p>1. Laporan pelaksanaan kegiatan desa binaan berupa penyuluhan, fasilitasi pembentukan forum <i>Whatsapp Group</i> (disertai tangkapan layar komunikasi dalam <i>forum group</i>) dan publikasi di media sosial serta laporan pelaksanaan petugas imigrasi pembina desa oleh Kantor Imigrasi.</p> <p>2. Laporan Kompilasi pelaksanaan kegiatan desa binaan oleh Divisi Keimigrasian.</p>
	Juli – September (B09)	<p>1. Laporan pelaksanaan kegiatan desa binaan</p> <p>2. Laporan Kompilasi pelaksanaan kegiatan desa binaan</p>	<p>Data Dukung:</p> <p>1. Laporan pelaksanaan kegiatan desa binaan berupa penyuluhan, fasilitasi pembentukan forum <i>Whatsapp Group</i> (disertai tangkapan layar komunikasi dalam <i>forum group</i>) dan publikasi di media sosial serta laporan pelaksanaan petugas imigrasi pembina desa oleh Kantor Imigrasi.</p> <p>2. Laporan Kompilasi pelaksanaan kegiatan desa binaan oleh Divisi Keimigrasian.</p>

	Oktober - Desember (B12)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan desa binaan 2. Laporan Kompilasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Binaan 	<p>Data Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan desa binaan oleh Kantor Imigrasi. 2. Laporan Kompilasi evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan desa binaan oleh Divisi Keimigrasian.
4. Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari-Maret (B03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetatan target sasaran 2. Pengetatan pengendalian petugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengetatan sasaran 2. Laporan Pengendalian Petugas 	<p>Data Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung berupa kalender dan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan pada Kantor Imigrasi (<i>format terlampir</i>) 2. Data dukung berupa laporan monitoring pelaksanaan tugas dan hasil pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian <p>Penjelasan: Laporan pengendalian petugas yang dimaksud adalah terwujudnya monitoring pelaksanaan tugas dan hasil yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi dan dilaporkan ke Ditwasdakim melalui Divisi Keimigrasian</p>
	April-Juni (B06)	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi	<p>Data Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait (dapat berupa laporan pelaksanaan kegiatan Tim PORA) oleh Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian 2. Laporan Kompilasi pelaksanaan koordinasi oleh Divisi Keimigrasian

	<p>Juli- September (B09)</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung</p>	<p>Laporan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung</p>	<p>Data dukung: 1. Laporan kondisi sarana dan prasarana pendukung dan analisa kebutuhan oleh Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian</p> <p>Penjelasan: Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti Pengadaan dan Penyesuaian Ruang Detensi dan Alat Dukung Lainnya seperti <i>Handy Talky</i>, Borgol, Alat Kejut dll.</p>
	<p>Oktober – Desember (B12)</p>	<p>Evaluasi pelaksanaan tugas</p>	<p>Laporan Evaluasi</p>	<p>Data dukung: 1. Laporan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi serta dikompilasi oleh Divisi Keimigrasian</p>